

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia menduduki peranan dan fungsi penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Semua sektor usaha baik dibidang industri, perdagangan, dunia usaha, dan jasa lainnya sangat membutuhkan bank dalam mengembangkan usahanya.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga perbankan, maka pemerintah menyusun suatu Undang-Undang yang mengatur lembaga perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

- a. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan adalah umum dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Bank umum memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Salah satu aktivitas bank umum yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan adalah penyaluran kredit. Namun penyaluran kredit belum optimal. Dalam memberikan kredit hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak bank, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu atau hal tersebut dapat juga disebabkan karena nasabah tidak sengaja misalnya akibat terjadinya bencana alam. Oleh karena itu setiap bank harus mempunyai pengendalian kredit dengan baik dan melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Penanggulangan kredit adalah suatu usaha atau tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Selain Bank Umum, di Indonesia juga terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa yang di tawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

PD BPR Kendali Artha merupakan salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu pelayanan yang diberikan dalam bentuk pemberian kredit. PD BPR Kendali Artha sampai saat ini telah menyalurkan kredit yang terdiri dari kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Kredit yang disalurkan ini berasal dari dana sendiri dan dana masyarakat. Peningkatan pemberian kredit oleh bank dapat mengakibatkan laba berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan juga akan menaikkan jumlah piutang. Dengan naiknya jumlah kredit akan diikuti pula





kemungkinan tidak tertagihnya kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). NPL mencerminkan kesulitan debitur dalam melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo. Jika rasio NPL semakin tinggi maka semakin buruk kualitas kredit bank yang disebabkan oleh tingkat pengembalian yang pada akhirnya menurunkan laba bank. Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar bagi bank adalah kurang lebih 5%.

Berikut ini pemberian kredit yang terjadi pada PD Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Pemberian kredit dan Rasio Non Performing Loan (NPL) Pada tahun 2019-2020.

2019			2020		
Kolektibilitas	Jumlah Kredit	Rasio NPL	Kolektibilitas	Jumlah Kredit	Rasio NPL
Kurang Lancar	1.301.295.587	1,23%	Kurang Lancar	587.707.097	0,56%
Diragukan	813.074.081	0,77%	Diragukan	1.071.698.587	1,02%
Macet	6.450.040.194	6,11%	Macet	7.017.654.319	6,70%
DPK	16.130.380.195	15,30%	DPK	15.859.592.912	15,14%
Lancar	80.776.488.947	76,59%	Lancar	80.191.818.331	76,58%
Jumlah	105.471.279.004	100%	Jumlah	104.728.471.246	100%

Sumber: BPR Kendali Artha data diolah (2020).

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat tahun 2019 total kredit Rp105.471.279.004 dengan rasio NPL sebesar 8,11% sedangkan pada tahun 2020 total kredit Rp104.728.471.246 dengan rasio NPL sebesar 8,28%. Jadi, selama tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 0,17%.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pentingnya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak PD BPR Kendali Artha dalam menanggulangi kredit yang digolongkan bermasalah dan menuangkan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul "Penanganan Kredit Bermasalah Pada PD BPR Kendali Artha" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas , maka rumusan masalah padatugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PD BPR Kendali Artha?
2. Bagaimana sistem penanganan kredit bermasalah pada PD BPR Kendali Artha?
3. Bagaimana pengendalian internal kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD BPR Kendali Artha?



1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tugas akhir ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PDBPR Kendali Artha.
2. Menguraikan sistem penanganan kredit bermasalah pada PD BPR Kendali Artha.
3. Menguraikan pengendalian internal kredit bermasalah pada PD BPR Kendali Artha.

1.4 Manfaat

Tugas akhir yang berjudul **“Penanganan Kredit Bermasalah Pada PD BPR Kendali Artha”** diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai kredit dan mengetahui bagaimana proses penanganan kredit bermasalah. Selain itu, masyarakat umum tersebut dapat mengetahui tugas-tugas dan rencana kerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi Penulis Sekolah Vokasi IPB, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kendali Artha.

- a. Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan dengan cara membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi di dalam perusahaan, khususnya sistem akuntansi penanganan dan penjurnalan kredit bermasalah pada PD BPR Kendali Artha.

- b. Sekolah Vokasi IPB

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.

- c. BPR Kendali Artha

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pegawai BPR yang bertugas terkait proses penanganan dan penjurnalan kredit serta dapat meningkatkan proses penanganan kredit bermasalah di tahun berikutnya.